



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.426, 2015

KEMENKUMHAM.
Perubahan.

Jabatan.

Kelas

Jabatan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dengan meningkatnya beban kerja Staf Khusus Menteri dan berdasarkan hasil evaluasi jabatan Staf Khusus Menteri yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/671/M.PANRB/2/2015 tanggal 20 Februari 2015 perihal Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan Staf Khusus Menteri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengubah kelas jabatan Staf Khusus Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);
 - 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 513) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1361);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal I

Ketentuan Kelas Jabatan Staf Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran, huruf B, bagian Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri, angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 513) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1361), diubah menjadi angka 16 (enam belas) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM
 DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2014
 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU,
 JABATAN FUNGSIONAL UMUM, DAN JABATAN LAINNYA SERTA
 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN
 HAK ASASI MANUSIA

A. DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN KELAS
 JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
 MANUSIA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	PERANCANG PERATURAN PERUU	
	PERANCANG PERATURAN PERUU PERTAMA	8
	PERANCANG PERATURAN PERUU MUDA	9
	PERANCANG PERATURAN PERUU MADYA	11
	PERANCANG PERATURAN PERUU UTAMA	13
2	PEMERIKSA PATEN AHLI	
	PEMERIKSA PATEN PERTAMA	8
	PEMERIKSA PATEN MUDA	9
	PEMERIKSA PATEN MADYA	11
	PEMERIKSA PATEN UTAMA	13
3	PEMERIKSA MEREK AHLI	
	PEMERIKSA MEREK PERTAMA	8
	PEMERIKSA MEREK MUDA	9
	PEMERIKSA MEREK MADYA	11
	PEMERIKSA MEREK UTAMA	13
4	PEMERIKSA MEREK TERAMPIL	
	PEMERIKSA MEREK PELAKSANA	6
	PEMERIKSA MEREK PELAKSANA LANJUTAN	7
	PEMERIKSA MERK PENYELIA	8
5	DOKTER/SPELIALIS	
	DOKTER PERTAMA	8
	DOKTER MUDA	9
	DOKTER MADYA	11
	DOKTER UTAMA	13
6	DOKTER GIGI/SPELIALIS	
	DOKTER GIGI PERTAMA	8
	DOKTER GIGI MUDA	9
	DOKTER GIGI MADYA	11
	DOKTER GIGI UTAMA	13

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
7	PERAWAT GIGI	
	PERAWAT GIGI PEMULA	5
	PERAWAT GIGI PELAKSANA	6
	PERAWAT GIGI PELAKSANA LANJUTAN	7
	PERAWAT GIGI PENYELIA	8
8	PERAWAT AHLI	
	PERAWAT PERTAMA	8
	PERAWAT MUDA	9
	PERAWAT MADYA	11
	PERAWAT UTAMA	13
9	PERAWAT TERAMPIL	
	PERAWAT PEMULA	5
	PERAWAT PELAKSANA	6
	PERAWAT PELAKSANA LANJUTAN	7
	PERAWAT PENYELIA	8
10	ARSIPARIS AHLI	
	ARSIPARIS PERTAMA	8
	ARSIPARIS MUDA	9
	ARSIPARIS MADYA	11
	ARSIPARIS UTAMA	13
11	ARSIPARIS TERAMPIL	
	ARSIPARIS PELAKSANA	6
	ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN	7
	ARSIPARIS PENYELIA	8
12	PUSTAKAWAN AHLI	
	PUSTAKAWAN PERTAMA	8
	PUSTAKAWAN MUDA	9
	PUSTAKAWAN MADYA	11
	PUSTAKAWAN UTAMA	13
13	PUSTAKAWAN TERAMPIL	
	PUSTAKAWAN PELAKSANA	6
	PUSTAKAWAN PELAKSANA LANJUTAN	7
	PUSTAKAWAN PENYELIA	8
14	WIDYASARA	
	WIDYASARA PERTAMA	8
	WIDYASARA MUDA	9
	WIDYASARA MADYA	11
	WIDYASARA UTAMA	13
15	PENELITI	
	PENELITI PERTAMA	8
	PENELITI MUDA	9
	PENELITI MADYA	11
	PENELITI UTAMA	13
16	AUDITOR AHLI	
	AUDITOR PERTAMA	8
	AUDITOR MUDA	9
	AUDITOR MADYA	11
	AUDITOR UTAMA	13

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
17	AUDITOR TERAMPIL	
	AUDITOR PELAKSANA	6
	AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN	7
	AUDITOR PENYELIA	8
18	PRANATA KOMPUTER AHLI	
	PRANATA KOMPUTER PERTAMA	8
	PRANATA KOMPUTER MUDA	9
	PRANATA KOMPUTER MADYA	11
	PRANATA KOMPUTER UTAMA	13
19	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	
	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA	6
	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	7
	PRANATA KOMPUTER PENYELIA	8
20	ANALIS KEPEGAWAIAN TERAMPIL	
	ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA	6
	ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA LANJUTAN	7
	ANALIS KEPEGAWAIAN PENYELIA	8
21	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI	
	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	8
	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA	9
	ANALIS KEPEGAWAIAN MADYA	11
	ANALIS KEPEGAWAIAN UTAMA	13
22	PSIKOLOG KLINIS AHLI	
	PSIKOLOG KLINIS PERTAMA	8
	PSIKOLOG KLINIS MUDA	9
	PSIKOLOG KLINIS MADYA	11
	PSIKOLOG KLINIS UTAMA	13
23	PENERJEMAH AHLI	
	PENERJEMAH PERTAMA	8
	PENERJEMAH MUDA	9
	PENERJEMAH MADYA	11
	PENERJEMAH UTAMA	13
24	PERENCANA AHLI	
	PERENCANA PERTAMA	8
	PERENCANA MUDA	9
	PERENCANA MADYA	11
	PERENCANA UTAMA	13
25	APOTEKER AHLI	
	APOTEKER PERTAMA	8
	APOTEKER MUDA	9
	APOTEKER MADYA	11
	APOTEKER UTAMA	13
26	ASISTEN APOTEKER	
	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA PEMULA	5
	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA	6
	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA LANJUTAN	7
	ASISTEN APOTEKER PENYELIA	8

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
27	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI	
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PERTAMA	8
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MUDA	9
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MADYA	11
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN UTAMA	13
28	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA PEMULA	5
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA	6
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN LANJUTAN	7
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA	8
29	FISIOTERAPIS AHLI	
	FISIOTERAPIS PERTAMA	8
	FISIOTERAPIS MUDA	9
	FISIOTERAPIS MADYA	11
	FISIOTERAPIS UTAMA	13
30	FISIOTERAPIS TERAMPIL	
	FISIOTERAPIS PELAKSANA	6
	FISIOTERAPIS PELAKSANA LANJUTAN	7
	FISIOTERAPIS PENYELIA	8
31	RADIOGRAFER TERAMPIL	
	RADIOGRAFER PELAKSANA	6
	RADIOGRAFER PELAKSANA LANJUTAN	7
	RADIOGRAFER PENYELIA	8
32	PEREKAM MEDIS	
	PEREKAM MEDIS PELAKSANA	6
	PEREKAM MEDIS PELAKSANA LANJUTAN	7
	PEREKAM MEDIS PENYELIA	8
33	NUTRISIONIS AHLI	
	NUTRISIONIS PERTAMA	8
	NUTRISIONIS MUDA	9
	NUTRISIONIS MADYA	11
	NUTRISIONIS UTAMA	13
34	NUTRISIONIS TERAMPIL	
	NUTRISIONIS PELAKSANA	6
	NUTRISIONIS PELAKSANA LANJUTAN	7
	NUTRISIONIS PENYELIA	8
35	ADMINISTRATOR KESEHATAN	
	ADMINISTRATOR PERTAMA	8
	ADMINISTRATOR MUDA	9
	ADMINISTRATOR MADYA	11
	ADMINISTRATOR UTAMA	13
36	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI	
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI PERTAMA	8
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI MUDA	9
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI MADYA	11
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI UTAMA	13

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
37	BIDAN AHLI	
	BIDAN PERTAMA	8
	BIDAN MUDA	9
	BIDAN MADYA	11
	BIDAN UTAMA	13
38	BIDAN TERAMPIL	
	BIDAN PELAKSANA PEMULA	5
	BIDAN PELAKSANA	6
	BIDAN PELAKSANA LANJUTAN	7
	BIDAN PENYELIA	8
39	PENYIDIK PPNS	
	PENYIDIK PPNS PERTAMA	8
	PENYIDIK PPNS MUDA	9
	PENYIDIK PPNS MADYA	11
	PENYIDIK PPNS UTAMA	13
40	PENYULUH HUKUM AHLI	
	PENYULUH HUKUM PERTAMA	8
	PENYULUH HUKUM MUDA	9
	PENYULUH HUKUM MADYA	11
	PENYULUH HUKUM UTAMA	13
41	ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI	
	ANALIS KEIMIGRASIAN PERTAMA	8
	ANALIS KEIMIGRASIAN MUDA	9
	ANALIS KEIMIGRASIAN MADYA	11
	ANALIS KEIMIGRASIAN UTAMA	13
42	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN TERAMPIL	
	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PEMULA	5
	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PELAKSANA	6
	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7
	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PENYELIA	8

B. DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN JABATAN LAINNYA SERTA KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
STAF AHLI DAN STAF KHUSUS MENTERI		
1	STAF AHLI BIDANG HUKUM LINGKUNGAN DAN PERTANAHAN	16
2	STAF AHLI BIDANG PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA	16
3	STAF AHLI BIDANG PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM	16
4	STAF AHLI BIDANG PEREKONOMIAN DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI	16
5	STAF AHLI BIDANG POLITIK SOSIAL DAN KEAMANAN	16
6	STAF KHUSUS MENTERI	16
ANGGOTA TEKNIS BHP		
	ANGGOTA TEKNIS HUKUM	10
FUNGSIONAL UMUM		
1	BENDAHARA PENGELUARAN PUSAT	8
2	BENDAHARA PENERIMAAN PUSAT	8
3	ANALIS EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7
4	ANALIS JABATAN	7
5	ANALIS KEBUTUHAN DAN MANFAAT PELATIHAN	7
6	ANALIS KELEMBAGAAN	7
7	ANALIS KONSEPSI, PRAKARSA DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7
8	ANALIS PENDAPAT HUKUM DAN ADVOKASI	7
9	ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT	7
10	ANALIS PENGEMBANGAN HUKUM	7
11	ANALIS PENGEMBANGAN PEGAWAI	7
12	ANALIS PENYELESAIAN PEWARGANEGARAAN	7
13	ANALIS PERATURAN DAERAH	7
14	ANALIS PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA	7
15	ANALIS PERJANJIAN KERJA SAMA	7
16	ANALIS PERMASALAHAN HAM	7
17	ANALIS PERMASALAHAN HUKUM	7
18	ANALIS PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI	7
19	ANALIS PERMOHONAN PENDAPAT HUKUM	7
20	ANALIS PERTIMBANGAN BANTUAN HUKUM	7
21	ANALIS PERTIMBANGAN EKSTRADISI	7
22	ANALIS PERTIMBANGAN HUKUM	7
23	ANALIS PROGRAM BIMBINGAN	7
24	ANALIS RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7
25	ANALIS SIDIK JARI	7
26	ANALIS SISTEM APLIKASI DAN JARINGAN KOMPUTER	7
27	ANALIS SISTEM PROSEDUR DAN METODE KERJA	7
28	ANALIS STANDARISASI SARANA KERJA	7
29	BENDAHARA PENERIMAAN SATKER	7

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
30	BENDAHARA PENGELUARAN SATKER	7
31	NAHKODA	7
32	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN	7
33	PENELAAH DOKUMEN FISIK PERSEROAN	7
34	PENELAAH RANCANGAN PERJANJIAN EKSTRADISI	7
35	PENELAAH STATUS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN	7
36	PENERJEMAHAN BAHAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7
37	PENGEVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN	7
38	PENYULUH HAK ASASI MANUSIA	7
39	PENYUSUN ABSTRAKSI HUKUM	7
40	PENYUSUN INFORMASI HUKUM	7
41	PENYUSUN KONSEP KETERANGAN PEMERINTAH	7
42	PENYUSUN LAPORAN DAN HASIL EVALUASI	7
43	PENYUSUN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	7
44	PENYUSUN LAPORAN PENGAWASAN	7
45	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	7
46	PENYUSUN MATERI BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH	7
47	PENYUSUN MATERI PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7
48	PENYUSUN MATERI KEBIJAKAN	7
49	PENYUSUN NASKAH AKADEMIK	7
50	PENYUSUN PROGRAM	7
51	PENYUSUN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	7
52	PENYUSUN TINDAK LANJUT DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	7
53	PENYUSUN BAHAN KERJA SAMA	7
54	DOKUMENTALIS HUKUM	6
55	KOMANDAN JAGA PEMASYARAKATAN/KEIMIGRASIAN	6
56	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	6
57	PENGELOLA ARSIP KEPEGAWAIAN	6
58	PENGELOLA BANTUAN HUKUM	6
59	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6
60	PENGELOLA BASAN/BARAN	6
61	PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	6
62	PENGELOLA DATA PENGHARMONISASIAN	6
63	PENGELOLA HASIL KERJA	6
64	PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI	6
65	PENGELOLA KEUANGAN	6
66	PENGELOLA PEMBIMBINGAN KEMANDIRIAN	6
67	PENGELOLA PEMBINAAN INTELEKTUAL	6
68	PENGELOLA PEMBINAAN KEMANDIRIAN	6
69	PENGELOLA PEMBINAAN KEPRIBADIAN	6
70	PENGELOLA PEMBINAAN ROHANI	6
71	PENGELOLA PENERBITAN JURNAL LEGISLASI INDONESIA	6
72	REGISTRATOR PEMASYARAKATAN	6

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
73	PENGELOLA RUMAH DETENSI	6
74	PENGELOLA SARANA KERJA	6
75	PENGELOLA SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN	6
76	PENGELOLA PENSIUN/PEMBERHENTIAN PNS	6
77	PENGELOLA WEBSITE	6
78	PENGEVALUASI KEGIATAN PROGRAM	6
79	PENGOLAH APLIKASI SISTEM INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6
80	PENGOLAH BAHAN DISTRIBUSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6
81	PENGOLAH BAHAN EVALUASI DAN DOKUMENTASI EKSTRADISI	6
82	PENGOLAH BAHAN EVALUASI DAN PELAPORAN	6
83	PENGOLAH BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	6
84	PENGOLAH BAHAN PENGKAJIAN DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6
85	PENGOLAH BAHAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN	6
86	PENGOLAH DAN PENYUSUN BAHAN BIMBINGAN TEKNIS HAM	6
87	PENGOLAH DAN PENYUSUN DATA FASILITATOR BIMBINGAN TEKNIS HAM	6
88	PENGOLAH DAN PENYUSUN DATA PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT	6
89	PENGOLAH DATA ADMINISTRASI KOMISI BANDING	6
90	PENGOLAH DATA ANGGARAN	6
91	PENGOLAH DATA APLIKASI DAN DATABASE	6
92	PENGOLAH DATA DAKTILOSKOPI	6
93	PENGOLAH DATA DAN BAHAN PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	6
94	PENGOLAH DATA DAN DOKUMENTASI HUKUM INTERNASIONAL UMUM	6
95	PENGOLAH DATA DISEMINASI HAM	6
96	PENGOLAH DATA EVALUASI DAN INFORMASI	6
97	PENGOLAH DAN PENYUSUN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN BIMBINGAN TEKNIS	6
98	PENGOLAH DATA HARTA PENINGGALAN	6
99	PENGOLAH DATA HASIL LAPORAN VERIFIKASI	6
100	PENGOLAH DATA HASIL PENELITIAN	6
101	PENGOLAH DATA HASIL PERTIMBANGAN DAN PENILAIAN PERLENGKAPAN	6
102	PENGOLAH DATA INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG	6
103	PENGOLAH DATA INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI	6
104	PENGOLAH DATA KEGIATAN ANTAR BADAN INTERNASIONAL	6
105	PENGOLAH DATA KEGIATAN RENCANA, PROGRAM DAN ANGGARAN	6
106	PENGOLAH DATA KELEMBAGAAN	6

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
107	PENGOLAH DATA KERJASAMA	6
108	PENGOLAH DATA KESEHATAN	6
109	PENGOLAH DATA KLASIFIKASI DESAIN INDUSTRI	6
110	PENGOLAH DATA KLASIFIKASI KELAS BARANG	6
111	PENGOLAH DATA KOMPILASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MASALAH DAN KASUS	6
112	PENGOLAH DATA KOVENAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	6
113	PENGOLAH DATA KOVENAN HAK SIPIL DAN POLITIK	6
114	PENGOLAH DATA LAPORAN	6
115	PENGOLAH DATA LAPORAN ANALISA KEBUTUHAN DAN PEMBAKUAN PERLENGKAPAN	6
116	PENGOLAH DATA LAPORAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	6
117	PENGOLAH DATA LAPORAN HAK-HAK KELOMPOK RENTAN	6
118	PENGOLAH DATA LAPORAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK	6
119	PENGOLAH DATA LAPORAN HAM YANG BERAT	6
120	PENGOLAH DATA LAPORAN HASIL PENYALURAN PERLENGKAPAN	6
121	PENGOLAH DATA LAPORAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN	6
122	PENGOLAH DATA LAPORAN MATERI INFORMASI	6
123	PENGOLAH DATA LAPORAN METODOLOGI DISEMINASI HAM	6
124	PENGOLAH DATA LAPORAN PENILAIAN PERBENDAHARAAN	6
125	PENGOLAH DATA LAPORAN PRODUKSI DAN INFORMASI	6
126	PENGOLAH DATA LAPORAN SISTEM APLIKASI DAN DATABASE	6
127	PENGOLAH DATA PENGEMBANGAN JARINGAN BIMBINGAN TEKNIS HAM	6
128	PENGOLAH DATA PERENCANAAN DAN PROGRAM	6
129	PENGOLAH DATA WASIAT	6
130	PENGOLAH SAI	6
131	PENYUSUN BAHAN KOORDINASI DAN MONITORING PERSIDANGAN	6
132	PENYUSUN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA	6
133	ROHANIawan AGAMA/PEMBIMBING AGAMA	6
134	SEKRETARIS PIMPINAN	6
135	TEKNISI JARINGAN	6
136	VERIFIKATOR	6
137	OPERATOR KOMPUTER	5
138	PEMBUAT DAFTAR GAJI	5
139	PEMELIHARA KANTOR	5
140	PEMERIKSA PELANGGARAN TATA TERTIB	5
141	PEMROSES BERKAS PERMOHONAN HARTA PENINGGALAN	5
142	PEMROSES DATA PENYIDIKAN DAN LITIGASI	5
143	PEMROSES IZIN ADVOKAT ASING	5

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
144	PEMROSES JAMINAN SOSIAL	5
145	PEMROSES LAYANAN HUKUM UMUM	5
146	PEMROSES LEGALISASI	5
147	PEMROSES MUTASI KEPEGAWAIAN	5
148	PEMROSES PERMOHONAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	5
149	PEMROSES STATUS KEWARGANEGARAAN RI	5
150	PEMROSES PENETAPAN PENGHAPUSAN PERLENGKAPAN	5
151	PEMROSES PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI	5
152	PEMROSES PENGEMBANGAN METODE PENYULUHAN HUKUM	5
153	PEMROSES PENYELESAIAN SENGKETA, LITIGASI DAN PENYIDIKAN	5
154	PEMROSES URUSAN ADMINISTRASI KOMISI BANDING	5
155	PEMROSES PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN	5
156	PENATAUSAHAAN	5
157	PENGADMINISTRASI BARANG DAN ATK	5
158	PENGADMINISTRASI BARANG MILIK NEGARA	5
159	PENGADMINISTRASI DATA PERMOHONAN PENDAPAT HUKUM	5
160	PENGADMINISTRASI JAMINAN FIDUSIA	5
161	PENGADMINISTRASI KEBUTUHAN DAN PEMBAKUAN PERLENGKAPAN	5
162	PENGADMINISTRASI LAYANAN KUNJUNGAN	5
163	PENGADMINISTRASI MANAJEMEN OUTSOURCING TEKNOLOGI INFORMASI	5
164	PENGADMINISTRASI PERJALANAN DINAS	5
165	PENGADMINISTRASI PERLENGKAPAN KEAMANAN	5
166	PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	5
167	PENGADMINISTRASI UMUM	5
168	PENGADMINISTRASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5
169	PENGAMBIL SIDIK JARI	5
170	PENGAWAL TAHANAN/NARAPIDANA	5
171	PENGELOLA ADMINISTRASI DIKLAT	5
172	PENGELOLA DAN PENGOLAH MAKANAN	5
173	PENGELOLA HASIL BELAJAR/EVALUASI PESERTA DIKLAT/PELATIHAN	5
174	PENGELOLA HUKUMAN DISIPLIN	5
175	PENGELOLA KENDARAAN DINAS	5
176	PENGELOLA TATA NASKAH	5
177	PENGHIMPUN BERITA	5
178	PENGHUBUNG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5
179	PENGHUBUNG ANTAR LEMBAGA	5
180	PENGOLAH ADMINISTRASI PIMPINAN	5
181	PENGOLAH ARSIP DAN DOKUMENTASI	5
182	PENGOLAH ARSIP TERAPAN	5

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
183	PENGOLAH DATA GAJI PEGAWAI	5
184	PENGOLAH DATA INVENTARIS	5
185	PENGOLAH DATA KEGIATAN PENGAMANAN	5
186	PENGOLAH DATA KENDARAAN OPERASIONAL	5
187	PENGOLAH DATA LAPORAN PEMBUKUAN	5
188	PENGOLAH DATA LAPORAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN	5
189	PENGOLAH DATA LAPORAN PENGIRIMAN DAN PENGANGKUTAN PERLENGKAPAN	5
190	PENGOLAH DATA SIDIK JARI	5
191	PENJAGA PINTU UTAMA PEMASYARAKATAN	5
192	PENYIAP BAHAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5
193	PENYIAP BAHAN BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERANCANG PERATURAN DAERAH	5
194	PENYIAP BAHAN DISTRIBUSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5
195	PENYIAP BAHAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5
196	PENYIAP BAHAN HUKUM TIDAK TERTULIS	5
197	PENYIAP BAHAN LAPORAN DAN EVALUASI	5
198	PENYIAP BAHAN LAPORAN HASIL PERTEMUAN ILMIAH	5
199	PENYIAP BAHAN LEGALISASI	5
200	PENYIAP BAHAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	5
201	PENYIAP BAHAN PEMBELAJARAN	5
202	PENYIAP BAHAN PENELITIAN HUKUM	5
203	PENYIAP BAHAN PENETAPAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL	5
204	PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN JARINGAN INFORMASI HUKUM	5
205	PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN METODE PENYULUHAN HUKUM	5
206	PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN OTOMASI	5
207	PENYIAP BAHAN PENGKAJIAN HUKUM	5
208	PENYIAP BAHAN PENYELENGGARA DIKLAT/PELATIHAN/PENYULUHAN	5
209	PENYIAP BAHAN PUBLIKASI	5
210	PENYIAP BAHAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5
211	PENYIAP DATA DAN BAHAN PENGHARMONISASIAN	5
212	PENYIAP DATA DAN PROGRAM LEGISLASI	5
213	PENYIAP DATA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	5
214	PENYIAP DOKUMENTASI NASKAH PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5
215	PENYIAP BAHAN KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM	5
216	PENYUSUN ARSIP DAN DOKUMENTASI	5
217	PETUGAS DOKUMENTASI (FOTOGRAFER)	5
218	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	5
219	PETUGAS PENGAMANAN DETENI	5
220	PETUGAS PROTOKOL	5

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
221	POLISI KHUSUS KEIMIGRASIAN/PEMASYARAKATAN	5
222	SATUAN PENGAMAN TAHANAN/NARAPIDANA	5
223	TEKNISI	5
224	PENGELOLA KELENGKAPAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA/TAHANAN	4
225	OPERATOR MESIN	4
226	OPERATOR TELEPON	4
227	PRAMU ACARA	4
228	TARUNA AKADEMI	4
229	PENGEMUDI	3
230	AGENDARIS	3
231	PETUGAS PENGGANDAAN	3
232	CARAKA	3

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY